

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- APEC Fisheries Working Grup, 2008, *Assessment Of Impact Of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing In The Asia-Pasific*, Singapura; Asia-Pasific Economic Cooperation Secretarist.
- Baird.R, 2010, *An Analysis of The Legal, Economic and Historical Factors Relevant to Its Development and Persistence*. Melbourne. Journal of International Law.
- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode Kearah Ragam Farina Kontemporer*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia., 2008 “*Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konevensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*”, Jakarta, DKP.
- Dimiyanti Hartono, 1976, *Hukum Laut Internasional (Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara NKRI )*, Jakarta, Bhatara karya aksara.
- Djalal Hasyim, 2001, *Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta, Binacipta.
- Gianni.M dan W.Simpson, 2005, *The Changing Nature Of High Sea Fishing, How Flag Of Convenience Provide Cover For Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*, WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries And Forestry, Australian Government.

- Halford Kashfi, 2013 “ *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*”, The PEW Charitable Trust.
- Hamzah Andi, 2015, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas.
- Herdiawan Didit, 2009, *Kedaulatan Pangan Maritim : Dinamika dan Problematika*, Jakarta, Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- John M. Echols dan Hassan Shadly, 2002, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kasian A. Thohir, 1985, *Butir-Butir Tata Lingkungan (Sebagai Masukan Untuk Arsitektur Landsekap Dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan)*, Jakarta, Bina Aksara.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2017, *Laut Masa Depan Bangsa (kedaulatan, keberlanjutan,kesejahteraan)*, Jakarta, KKP.
- Lexy, J.Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Remaja Rosda Karya.
- Mahmudah Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno. 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Moelijanto, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet ke dia puluh satu, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Salim, 2003, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern English Press.

Penny Richard, "*Why Australia Ratified The Convention*" *Dalam Maritime Tsamenyi*, Sam Bateman and John Delayne.

Raharjo Satjipto, 2005 *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Biru.

Section II International Plan of Action to Prevent, 2001, *Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, Rome, Food And Agriculture Organization of The United Nations.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.

\_\_\_\_\_Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Subagyo P Joko, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Sumardjono Maria SW, 2014, *Metedeolgi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Susilo,RK 2008, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Warasih Esmi, 2012, *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang, Suryandaru Utama.

Wijana Nyoman, 2014, *Hukum Lingkungan edisi 2*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

## **B. Internet**

[www.Djpsdkp.Kkp.Go](http://www.Djpsdkp.Kkp.Go), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan  
Dan Perikanan.

[www.Djpsdkp.Kkp.Go.Id](http://www.Djpsdkp.Kkp.Go.Id), Tambah Tiga Pengadilan Perikanan Untuk Indonesia  
Timur

[www.Dkp.Kkp.Go.Id](http://www.Dkp.Kkp.Go.Id), Permasalahan IUU Fishing

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Laut

[www.industri.bisnis.com](http://www.industri.bisnis.com), susi pudjiastuti ini modus baru penangkapan ikan ilegal

[www.greenpeace.org](http://www.greenpeace.org), Laut Indonesia Dalam Krisis

[www.mukhtar-api.blogspot.com](http://www.mukhtar-api.blogspot.com), illegal fishing di Indonesia

[www.pusatstudisumberdayapesisirlaut.blogspot.co.id](http://www.pusatstudisumberdayapesisirlaut.blogspot.co.id), illegal fishing

[www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id), potensi besar perikanan tangkap indonesia

## **C. Lain-Lain**

Indra Hermawan, Perencana Muda Pusat Riset Kelautan, blasan surat elektronik ,  
23 Oktober 2017

Soralokita , Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian  
Sengketa, Kementrian Kordinator Bidang Kemaritiman, Wawancara  
narasumber , 24 Oktober 2017.

#### **D. Makalah/ Artikel/ Jurnal/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Akhir Penelitian**

Dewi B Indira, 2009, tesis, *Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal Studi Kasus : Praktik Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Editorial Baracuda, 2005, *Jurnal “Membangun Visi PEngawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”*, Jurnal Barracuda PPSDKP, Volume II, No. 2.

Neka Arifin, 2010, *Tesis, Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Kabupaten Halmahera Utara*, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Renhoran Maimunah, 2012, *Tesis Strategi Penanganan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fising Di Laut Arafura*, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Suhana, 2005, *IUU Fishing dan kerentanan sosial nelayan*, Jakarta.

#### **E. Undang undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kelautan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang Undang Nomor 34 tentang Tentanra Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( *Trawls* ) dan Pukat Tarik ( *Seine Nets* ) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

UNCLOS 1982, Part V, Article 73 tentang Exclusif Economic Zone